



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018-2023)

Zalza Putri Maharani, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD) and transfer funds on the level of regional financial independence in districts and cities in Central Java during the 2018-2023 period. Regional financial independence is an important indicator in assessing the ability of a region to finance government and development activities without relying on assistance from the central government. The method used in this study is regression analysis with panel data covering 29 districts and 6 cities in Central Java.

The results of the study show that PAD has a positive and significant influence on the level of regional financial independence, which indicates that increasing PAD will contribute to increasing financial independence. In contrast, transfer funds from the central government show a negative influence on regional financial independence, indicating that reliance on transfer funds can reduce regional incentives to increase PAD. In addition, there are significant differences in the level of financial independence between districts and cities, which are influenced by factors such as the potential of regional resources and the fiscal policies implemented.

Based on these findings, it is suggested that local governments focus more on developing PAD sources and reducing dependence on transfer funds. Policies that support regional capacity building in managing and utilizing local resources are indispensable to achieve better financial independence. This research is expected to contribute to more effective policy making in regional financial management in Central Java.

Keywords: Regional Original Revenue, Transfer Funds, Regional Financial Independence, Central Java, Regression Analysis

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu wujud reformasi struktural dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai aktivitas pemerintahannya tanpa bergantung secara penuh pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah tidak hanya mencerminkan kekuatan fiskal suatu wilayah, tetapi juga menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Daerah yang mandiri secara fiskal diharapkan mampu menggali potensi ekonomi lokalnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembangunan. Namun pada kenyataannya, mayoritas daerah di Indonesia masih menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Hal ini tercermin dari tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, turut memperkuat fenomena ini. Beliau mengungkapkan bahwa hingga saat ini, 46,6% dari Anggaran Pendapatan dan

¹ Corresponding author

Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi dan 66,4% dari APBD kabupaten/kota masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan daerah yang mandiri secara fiskal masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

Di antara banyaknya provinsi di Indonesia, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti. Provinsi ini memiliki 35 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan geografis yang beragam. Beberapa daerah seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta memiliki kontribusi PAD yang tinggi, sedangkan kabupaten lain seperti Grobogan atau Blora masih sangat bergantung pada dana pusat. Keberagaman inilah yang menjadikan Jawa Tengah sebagai representasi yang tepat dalam mengkaji tingkat kemandirian fiskal daerah secara lebih mendalam.

Dalam studi ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana pengaruh PAD serta komponen dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. PAD mencerminkan kemampuan asli daerah dalam menghasilkan pendapatan, sedangkan DAU, DAK, dan DBH mencerminkan sejauh mana daerah masih bergantung pada pusat. Dengan menggunakan data panel dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2018–2023, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami pola hubungan antara pendapatan daerah dan kemandirian fiskal. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil dan mendorong percepatan kemandirian keuangan daerah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, menyajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan antar variabel, serta menyusun hipotesis yang dikembangkan berdasarkan landasan teoritis tersebut.

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal merupakan landasan konseptual yang menjelaskan pembagian kewenangan dan tanggung jawab fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan yang efisien, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi fiskal merupakan bagian integral dari konsep desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya. Menurut Mardiasmo (2016) desentralisasi didefinisikan dengan sebuah kekuasaan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan otonomi. Menurut tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 perihal Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan kekuasaan, hak dan kewajiban kepada daerah agar mengelola dan mengurus pemerintahannya sendiri serta kepentingan sipil setempat.

Teori Kemandirian Keuangan Daerah

Teori kemandirian keuangan daerah merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi pada dana dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan dari sumber pendapatan yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2007), kemandirian fiskal daerah dapat diukur melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dicapai oleh daerah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas desentralisasi fiskal karena menunjukkan kapasitas daerah dalam mengelola potensi ekonominya.

Kemandirian keuangan daerah bukan hanya menggambarkan kekuatan finansial daerah, tetapi juga mencerminkan kemampuan tata kelola dan perencanaan fiskal daerah. Daerah yang mandiri secara fiskal umumnya memiliki strategi pengelolaan keuangan yang baik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta mampu menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam hal ini, PAD berperan strategis sebagai sumber pendapatan yang

mencerminkan kemampuan internal suatu daerah, baik melalui pajak daerah, retribusi, maupun hasil pengelolaan aset.

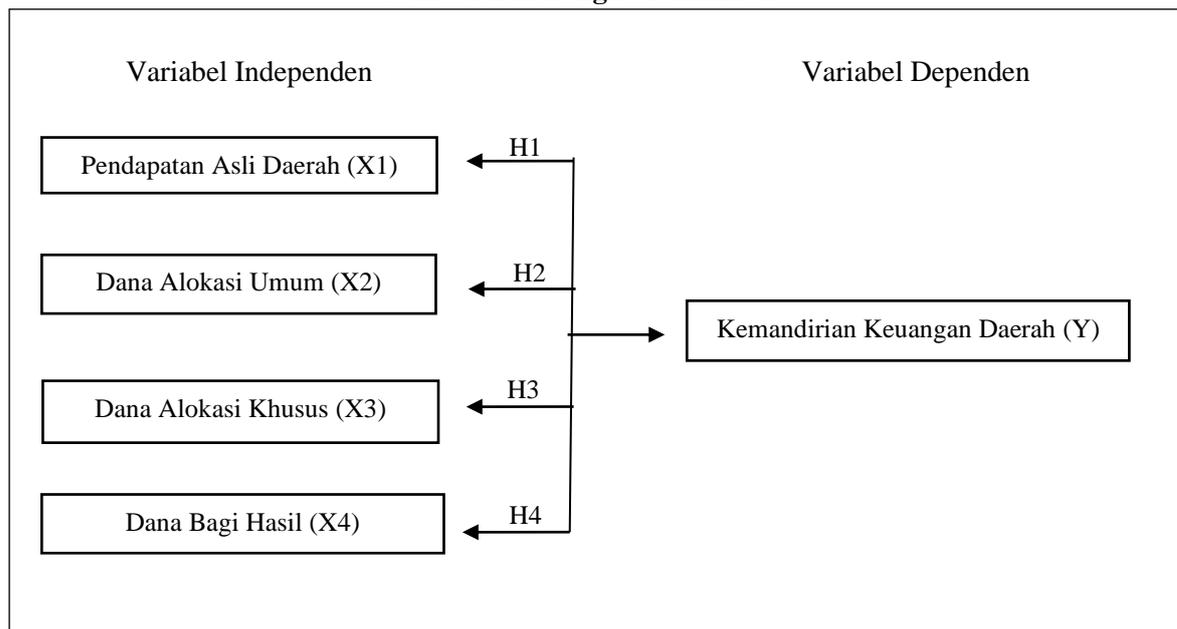
Namun, dalam praktiknya, banyak daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mencapai kemandirian fiskal. Ketergantungan terhadap transfer dari pusat masih tinggi, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan ini tidak hanya menunjukkan lemahnya basis ekonomi lokal, tetapi juga menimbulkan permasalahan dalam perencanaan pembangunan yang seringkali terhambat oleh keterlambatan atau ketidakpastian alokasi dana transfer. Hal ini menunjukkan pentingnya mendorong optimalisasi PAD dan memperkuat kelembagaan fiskal di daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan, pemerintah daerah perlu berinovasi dalam menggali potensi sumber daya lokal, memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dukungan regulasi yang memberikan fleksibilitas fiskal kepada daerah juga menjadi kunci penting. Dengan peningkatan kemandirian fiskal, diharapkan daerah tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi juga mampu menyusun dan membiayai kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti melalui skema visual. Dalam penelitian ini, digunakan variabel dependen dan independen sebagai bagian dari analisis hubungan antar variabel.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah, karena mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada dana pusat. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dengan PAD yang kuat, daerah memiliki fleksibilitas lebih dalam mengatur alokasi anggaran, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini

menjadikan PAD tidak hanya sebagai sumber penerimaan utama, tetapi juga sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Lebih jauh, kemandirian keuangan yang didorong oleh peningkatan PAD memungkinkan daerah untuk menjalankan berbagai inisiatif pembangunan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Daerah dengan PAD tinggi memiliki potensi lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, kemandirian fiskal juga memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara holistik. Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga menjadi katalis bagi pembangunan yang berkesinambungan dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi. Didasarkan atas penjelasan tersebut, oleh karena itu hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1: Rata-rata Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan masing-masing daerah, di mana daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah akan menerima alokasi DAU yang lebih besar. Meskipun DAU bertujuan untuk membantu pemerataan fiskal, peningkatan DAU justru berpotensi menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah karena menumbuhkan ketergantungan terhadap dana pusat. Marizka (2013) menemukan bahwa peningkatan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah, seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, di mana kenaikan DAU disertai dengan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memperoleh DAU dalam jumlah besar cenderung belum mampu mengelola keuangannya secara independen dan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dengan demikian, meskipun secara nominal penerimaan daerah meningkat akibat DAU, derajat otonomi fiskal justru dapat menurun. Ketergantungan ini menghambat kemampuan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal. Oleh karena itu, untuk memperkuat kemandirian keuangan, daerah perlu lebih fokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memiliki keleluasaan dalam menyusun dan mengimplementasikan program pembangunan yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan beberapa temuan dengan sumber penelitian terdahulu, sehingga hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Rata-rata Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membiayai program-program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab daerah, khususnya daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah. Alokasi DAK yang besar sering kali menunjukkan bahwa daerah tersebut belum sepenuhnya mandiri secara fiskal. Penelitian Marizka (2013) menunjukkan adanya hubungan negatif antara DAK dan kemandirian keuangan daerah, di mana peningkatan DAK di beberapa wilayah, seperti di Provinsi Sumatera Utara, justru menurunkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya sendiri. Meskipun DAK dapat menambah penerimaan daerah, ketergantungan pada dana pusat cenderung meningkat dan menghambat tercapainya otonomi fiskal. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian keuangan, daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap DAK dengan mengoptimalkan PAD, agar mampu menyusun program pembangunan secara independen dan sesuai kebutuhan lokal. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H3: Rata-rata Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, dan berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Semakin besar persentase DBH yang diterima, maka semakin tinggi kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Namun, beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Chabibillah (2019) di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pusat, yang secara tidak langsung menurunkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Meskipun DBH dapat meningkatkan penerimaan, ketergantungan yang tinggi dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal, sehingga berdampak pada rendahnya otonomi fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H4: Rata-rata Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan tentang karakteristik populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, definisi serta pengukuran masing-masing variabel, dan juga menjelaskan model analisis yang diterapkan dalam studi ini.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Populasi yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan ketentuan sampelnya memakai sampling total, di mana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel yang dipakai penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota, sesuai dengan jumlah total daerah administratif di Jawa Tengah. Teknik ini memastikan bahwa tiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah terwakili dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi di seluruh wilayah tersebut.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan Variabel terikat tunggal dalam penelitian ini adalah Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan empat variabel bebas yang berperan sebagai faktor pengaruh adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

| Variabel | Simbol | Pengukuran |
|---|--------|---|
| Variabel Dependen Kemandirian Keuangan Daerah | TKKD | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total bantuan pemerintah |
| Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah | PAD | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah |
| Dana Alokasi Umum | DAU | Persentase Dana Alokasi Umum terhadap total pendapatan daerah |
| Dana Alokasi Khusus | DAK | Persentase Dana Alokasi Khusus terhadap total pendapatan daerah |
| Dana Bagi Hasil | DBH | Persentase Dana Bagi Hasil terhadap total pendapatan daerah |

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu diuji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas (untuk memastikan residual berdistribusi normal), uji multikolinearitas (untuk menghindari korelasi tinggi antar variabel independen), uji heteroskedastisitas (untuk menguji apakah residual memiliki varians yang konstan), serta uji autokorelasi (untuk mendeteksi hubungan antar residual dalam data time series). Setelah model memenuhi asumsi, dilakukan uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, dan uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Selain itu, digunakan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Serangkaian pengujian ini bertujuan untuk memperoleh model yang valid dan akurat dalam menggambarkan pengaruh PAD dan dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis.

Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan total 35 entitas daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan data deret waktu selama enam tahun (2018–2023) yang telah dilakukan rata-rata, sehingga diperoleh total 35 observasi. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang diperoleh dari BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan analisis statistik deskriptif untuk variabel yang digunakan, analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap lima variabel utama dengan jumlah sampel sebanyak 35. Untuk variabel tingkat kemandirian keuangan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 26,1851 dengan nilai minimum 14,23 dan maksimum 96,17, serta rentang sebesar 81,94. Nilai standar deviasi sebesar 14,6241 dan varians 213,865 menunjukkan penyebaran data yang cukup besar.

Untuk variabel pendapatan asli daerah (PAD), rata-rata yang diperoleh sebesar 19,3966 dengan minimum 12,03 dan maksimum 47,99. Rentangnya adalah 35,96 dengan standar deviasi sebesar 7,1200.

Variabel dana alokasi umum (DAU) menunjukkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 42,1357, dengan nilai minimum 21,91 dan maksimum 48,05. Rentangnya adalah 26,14 dengan standar deviasi 4,3165.

Pada variabel dana alokasi khusus (DAK), diperoleh rata-rata sebesar 14,4703, dengan minimum 6,51 dan maksimum 19,00. Rentang data adalah 12,49, standar deviasi sebesar 2,6235.

Sementara itu, dana bagi hasil (DBH) memiliki rata-rata 20,2469, dengan nilai minimum 18,20 dan maksimum 26,18. Rentangnya cukup kecil, yaitu 7,98, dan standar deviasi yang rendah pula sebesar 2,1470.

Jika dilihat secara umum, hubungan antar variabel dapat dikaji lebih lanjut melalui analisis korelasi. Berdasarkan pola statistik deskriptif yang ada, dapat diasumsikan bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah relatif kecil karena standar deviasi mendekati nilai minimum.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Tingkat Kemandirian Keuangan | 35 | 14.23 | 96.17 | 26.18 | 14.62412 |
| Pendapatan Asli Daerah | 35 | 12.03 | 47.99 | 19.39 | 7.12001 |
| Dana Alokasi Umum | 35 | 21.91 | 48.05 | 42.13 | 4.31651 |
| Dana Alokasi Khusus | 35 | 6.51 | 19.00 | 14.47 | 2.62355 |
| Dana Bagi Hasil | 35 | 18.20 | 26.18 | 20.24 | 2.14704 |
| Valid N (listwise) | 35 | | | | |

Sumber: data sekunder yang diolah (2025)

Uji Normalitas

Tabel 3 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *asympt. sig.* tiap variabel memiliki nilai > 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian berdistribusi secara normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

| | | Unstandardized Residual |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 35 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.31375368 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .085 |
| | Positive | .085 |
| | Negative | -.059 |
| Test Statistic | | .085 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | .200 |

Sumber: data sekunder yang diolah (2025)

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4 Berdasarkan Model Summary Table, diketahui bahwa Adjusted R Square-nya bernilai 0,972. Dapat dikatakan hal ini menunjukkan variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mampu menjelaskan variasi yang ada pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 97,2%, sedangkan sisanya sebesar 2,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini.

Selain itu, nilai R Square sebesar 0,975 memperjelas bahwa hubungan antara X dan Y sangat kuat sebab mendekati nilai 1. Ini mengindikasikan bahwa model regresi yang terbentuk sangat baik dalam menjelaskan variasi data.

Nilai Standard Error of the Estimate sebesar 2,46318 memperlihatkan tingkat kesalahan standar dalam model.

Dari hasil ini, dapat diberi kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki prediksi yang sangat baik.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,987 | 0,975 | 0,972 | 2.46318 |

Sumber: data sekunder yang diolah (2025)

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan tabel 5 Berdasarkan tabel ANOVA, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh dalam model regresi ini adalah $< 0,001$, yang berarti kondisi di bawah nilai probabilitas $0,050$. Kondisi tersebut menandakan model regresi signifikan keseluruhan dan mempunyai hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain itu, nilai F hitung sebesar $292,117$ menunjukkan bahwa model regresi ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi nilai F, semakin baik model dalam menjelaskan hubungan antar independen variabel dengan dependen variabel. Dengan demikian, disimpulkan bahwasanya PAD, DAU, DAK, dan DBH secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tabel 5
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|---------|-------|
| 1 Regression | 7089.393 | 4 | 1772.348 | 292.117 | 0,001 |
| Residual | 182.018 | 30 | 6.067 | | |
| Total | 7271.410 | 34 | | | |

Sumber: data sekunder yang diolah (2025)

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 6 menggambarkan Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 35.709 . Hal ini berarti bahwa jika variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah diperkirakan sebesar 35.709 .

Berdasar *Coefficients table*, diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien regresi sebesar $1,636$ dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan, yang berarti semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin mandiri keuangan daerah tersebut.

Sementara itu, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai koefisien regresi $-0,767$ dan nilai signifikansi $< 0,001$, berarti DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan. Artinya, semakin besar DAU yang diperoleh daerah, justru tingkat kemandirian keuangan cenderung menurun. Hal ini dapat terjadi karena ketidakmandirian daerah dengan transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), koefisien regresinya bernilai $-0,548$ dan tingkat signifikansinya $0,035$, yang berarti pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Mengindikasikan bahwa makin besar alokasi DAK, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah, kemungkinan karena penggunaannya yang lebih terikat pada proyek-proyek tertentu daripada meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien regresi $-0,394$ dan signifikansi bernilai $0,123$. Dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar dari $0,05$, dapat diberi kesimpulan adanya DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kondisi tersebut bisa terjadi karena besaran DBH yang diterima daerah masih belum cukup untuk meningkatkan kemandirian keuangan secara nyata atau penggunaannya masih belum optimal.

Tabel 6
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. | |
|-------|-----------------------------|------------|----------------------|-------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Coefficients Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 35.709 | 8.229 | 4.339 | <,001 | |
| | pendapatan asli daerah | 1.636 | .093 | .797 | 17.529 | <,001 |
| | dana alokasi umum | -.767 | .132 | -.226 | -5.826 | <,001 |
| | dana alokasi khusus | -.548 | .248 | -.098 | -2.215 | .035 |
| | dana bagi hasil | -.394 | .248 | -.058 | -1.586 | .123 |

Sumber: data sekunder yang diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel Coefficients, persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemandirian Keuangan} = 35.709 + 1.636(\text{PAD}) - 0.767(\text{DAU}) - 0.548(\text{DAK}) - 0.394(\text{DBH}) + \varepsilon$$

Di mana:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki tingkat signifikansi 0,001, yang berarti PAD berpengaruh signifikan.
2. DAU (Dana Alokasi Umum) memiliki signifikansi 0,001, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan.
3. DAK (Dana Alokasi Khusus) memiliki tingkat signifikansi 0.035, yang berarti DAK berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan.
4. DBH (Dana Bagi Hasil) memiliki nilai signifikansinya 0.123 (di atas 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan.
5. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan, dan DBH tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Uji Hipotesis

Pada tabel 7 merepresentasikan ringkasan hasil uji hipotesis.

Tabel 7
Uji Hipotesis

| Pernyataan Hipotesis | p-value | Keputusan |
|---|---------|-----------|
| H1: Rata-rata Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | 0,001 | Diterima |
| H2: Rata-rata Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | 0,001 | Diterima |
| H3: Rata-rata Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | 0,035 | Diterima |
| H4: Rata-rata Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | 0,123 | Ditolak |

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Temuan ini sesuai dengan teori menurut Halim yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Oleh karena itu,

hipotesis pertama (**H1**) **diterima**. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2018) dan Misra & Annisa (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerahnya.

Hasil uji hipotesis juga menampilkan bahwa DAU mampu pengaruhi secara negatif kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU yang diperoleh daerah, justru makin rendah tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Hal ini sejalan ini sesuai dengan teori menurut Halim yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dapat menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah. Oleh karena itu, hipotesis kedua (**H2**) **diterima**. Hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo & Firmansyah (2021) yang menyebutkan bahwa DAU cenderung membuat pemerintah daerah bergantung pada transfer dana dari pusat, sehingga menghambat upaya daerah meningkatkan pendapatan aslinya.

Hasil pengujian hipotesis terkait DAK juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,035. Artinya, semakin besar DAK yang diterima, semakin rendah tingkat kemandirian finansial daerahnya. Hasil ini selaras dengan teori menurut Halim yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus dapat menurunkan Kemandirian Keuangan Daerah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (**H3**) **diterima**. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Pratama (2022) yang menyatakan adanya DAK lebih banyak digunakan untuk mendanai program atau kegiatan tertentu yang telah ditentukan pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki keterbatasan dalam pengelolaan anggaran secara mandiri.

Sementara itu, hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan signifikansinya senilai 0,123 yang $>0,050$. Temuan ini membuktikan bahwa besaran DBH yang diterima oleh daerah tidak secara langsung meningkatkan kemandirian keuangan mereka. Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Lestari & Wicaksono (2019) konsisten, yang menyatakan bahwa DBH cenderung digunakan untuk belanja rutin daerah dan tidak mendorong daerah untuk meningkatkan pendapatan asli mereka. Oleh karena itu, hipotesis keempat (**H4**) **ditolak**.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini yang mengambil data di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa usaha peningkatan kemandirian keuangan daerah, perlu lebih berfokus pada optimalisasi PAD dibandingkan dengan mengandalkan transfer dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan DBH. Selain itu, kebijakan transfer dana sebaiknya diarahkan untuk mendorong daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya sehingga tidak sekedar tergantung pada anggaran pusat.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di 29 Kabupaten dan 6 Kota selama 2018 hingga 2023 yang kemudian di rata-rata.

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD, semakin mandiri suatu daerah secara fiskal. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan, yang menandakan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat cenderung menghambat otonomi fiskal daerah. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemandirian. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi PAD sebagai instrumen utama dalam mendorong kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

**Keterbatasan**

Berdasar penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian mendatang supaya dapat memberikan hasil lebih baik dan komprehensif. Meskipun telah dilakukan secara sistematis, penelitian ini masih memiliki satu keterbatasan utama. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, yang memiliki asumsi linearitas, normalitas, dan bebas multikolinearitas. Namun, hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan kemandirian keuangan daerah dalam praktiknya bisa saja bersifat non-linear atau dinamis antar tahun. Oleh karena itu, pendekatan ini mungkin belum sepenuhnya menangkap kompleksitas hubungan antar variabel. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan pendekatan statistik lanjutan seperti regresi panel dinamis atau model SEM agar hasil yang diperoleh lebih mendalam dan adaptif terhadap pola data yang kompleks

Saran

Berdasarkan hasil analisis, temuan, dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat rekomendasi yang dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan analisis yang lebih kompleks dan adaptif terhadap pola data yang dinamis. Mengingat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan kemandirian keuangan daerah berpotensi bersifat non-linear dan berubah antar waktu, maka metode seperti regresi panel dinamis dapat digunakan untuk menangkap interaksi antar variabel secara lebih menyeluruh. Dengan penggunaan metode tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

**REFERENSI**

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2016). Globalisasi Perekonomian, Sistem Ekonomi Nasional, dan Otonomi Daerah. *Economic Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.20885/ejem.v5i1.6895>
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011). *Jurnal Akuntansi*, 26(4), 1–37
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Badan Penerbit UPP AMP YKPN
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. 3rd ed. Yogyakarta: Badan Penerbit UPP AMP YKPN
- Lestari, A., & Wicaksono, T. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 45-60
- Chabibillah, A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Misra, S., & Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2): 98-111. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.199>
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 79–92
- Susilo, B., & Firmansyah, Y. (2021). Dana Alokasi Umum dan Kemandirian Daerah: Analisis Empiris. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 10(3), 90-105
- Rahmawati, D., & Pratama, A. (2022). Analisis Dana Alokasi Khusus dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 11(1), 75-90